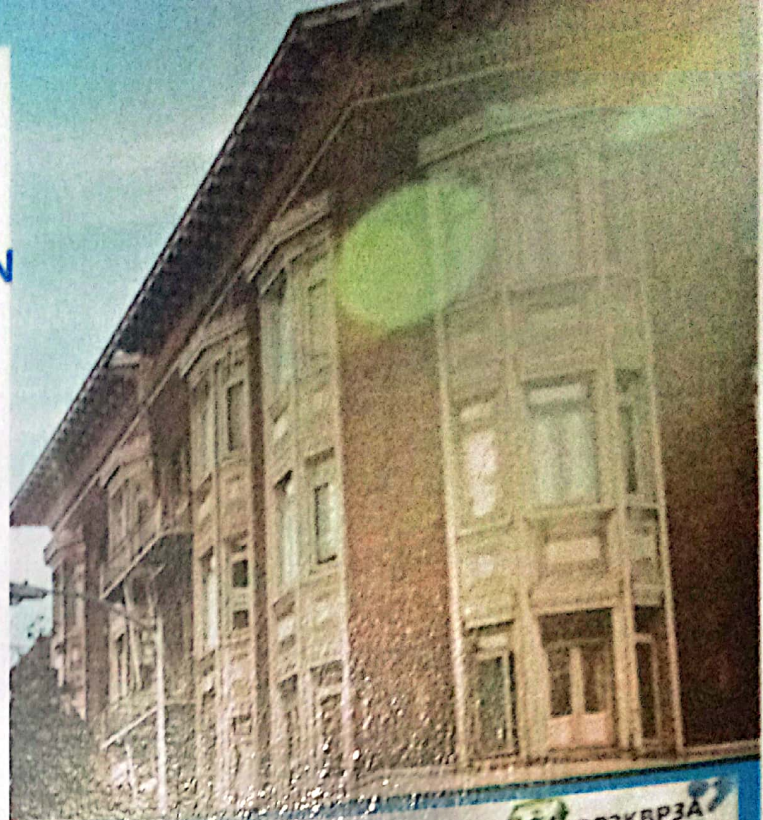


**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA TAHUN 2023)**



KABUPATEN FLORES TIMUR

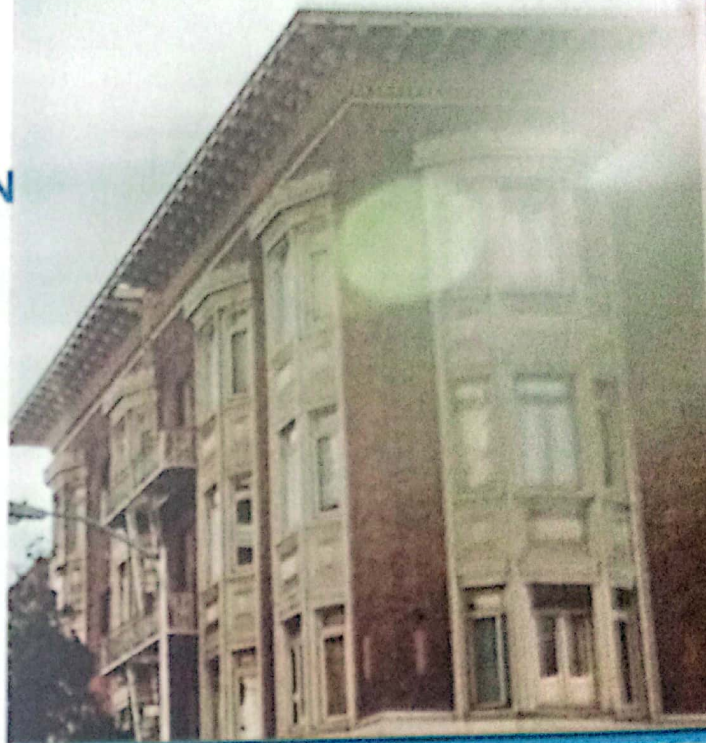


**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA TAHUN 2023)**



KABUPATEN FLORES TIMUR



KATA PENGANTAR

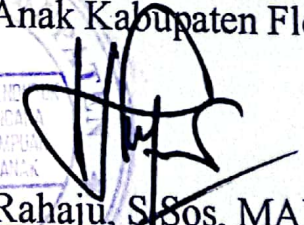
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat disusun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Perubahan RKPD dengan mempertimbangkan evaluasi dari capaian target kinerja yang diperoleh sampai dengan triwulan II.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritikan dan saran masukan demi penyempurnaan untuk penyusunan dan penyajian dokumen yang sama pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur,


Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP
NIP. 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Tujuan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB IV PENUTUP.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Perangkat Daerah DP2KBP3A Tahun 2023 Triwulan II.....	6
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Perangkat Daerah DP2KBP3A Tahun 2023 Triwulan II.....	23
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 DP2KBP3A.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan - permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2023;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 didasarkan

atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Flores Timur No 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2023 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
- b. Untuk merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur selama Tahun 2023.

- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan perubahan renja dan menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Perubahan. Renja DP2KBP3A,

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Menjelaskan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terhadap capaian program serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2023, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja PD mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan pada pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada DP2KBP3A masih rendah, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang pada saat sekarang dilaksanakan langsung oleh petugas lapangan. Hasil evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran 2.1

Tabel 2.1

9

1	01	2.02	07	Kendala dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	8	60.000.000	2	14.999.660	3	0	5.584.000	0,0	0,0	0,0
2				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	28.000.000	1	7.499.620			7.250.000	0,0	0,0	0,0
1	01	2.03		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	28.000.000	1	7.499.620	0	0	7.250.000	0,0	0,0	0,0
2			06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	20.000.000	1	9.995.000	0	0	3.945.000	0,0	0,0	0,0
1	01	2.05		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	20.000.000	1	9.995.000			3.945.000	0,0	0,0	0,0
2			04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	477.675.800	100	174.533.320	44.642.803		38.775.527	0,0	0,0	0,0
1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	477.675.800	100	174.533.320	44.642.803		38.775.527	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		02	2.02	02		Jumlah Kelengkapan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	150.000.000					10	29.999.630	0	0	0	0,0	9,6
Program Perlindungan Perempuan				03		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diadukan (%)		105.000.000					0,0	19.995.510	0	0	0	0,0	0,0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.01	03															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		02	2.01	03		Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)	0	-											
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.03	03		Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		105.000.000				24	19.995.510		0	0	0	0,0	0,0
Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		02	2.03	03		Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)		105.000.000				24	19.995.510		0	0	0	0,0	0,0
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				04		Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		422.000.000				Tingkat Pra tun a	99.940.365		0	14.000.000	0	0,0	0,0

2	0	08	2.02	01	Perencanaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Newangan Kab Kota	95	140.000.000			35	19.999.900	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0,0	0,0
2	1				Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Newangan Kab Kota (orang)		25.596.100.000				10.018.969.254	0	111.815.000	2.501.659.600	0	2.613.474.600	0,0	0,0
2	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												0,0	0,0
2	1	02			Program Pengendalian Penduduk	25	282.500.000			7	383.926.760		-	126.250.000	0	126.250.000	0,0	0,0
2	1	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24	282.500.000			6	383.926.760		-	126.250.000	0	126.250.000	0,0	0,0
2	1	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	67.500.000			7	19.999.900		0		0	0	0,0	0,0
2	1	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	12	55.000.000			3	101.086.860		0	32.800.000	0	32.800.000	0,0	0,0
2	1	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	39	130.000.000			12	185.400.000		0	61.000.000	0	61.000.000	0,0	0,0
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													

2	1	4	02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	37	30.000.000		12	77.440.000		0	32.450.000	0	0,0	0,0	
2	1	4	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	57	24.593.600.000		53,63	7.737.042.494		111.915.000	0	1.934.424.600	0,0	0,0	
							Cakupan Akseptor Baru (%)	70			62				0	0	#DI V/O	#DIV/0!	
2	1	4	03			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	1.560.400.000		1	1.560.400.000		12.435.000	0	777.070.000	0,0	0,0	
2	1	4	03	01		Advokasi Program KBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	15	270.000.000		15	201.000.000		12.435.000	15	96.210.000	0,0	0,0	
2	1	4	03	04		Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	260.000.000		1	150.000.000		0	0	30.000.000	0,0	0,0	

2	1	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	16	650.000.000	4	213.200.000	0	60.800.000	0	60.800.000	0,0	9,6
2	1	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	48	240.000.000	12	914.938.000	0	569.525.000	0	569.525.000	0,0	0,0
2	1	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP	8	140.000.000	2	84.230.000	0	20.535.000	0	20.535.000	0,0	0,0
2	1	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4	1.250.000.000	1	1.309.200.000	-	478.100.000	0	478.100.000	0,0	0,0

2	1	03	2.03	01	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang diadukan (jenis)	24	30.198.350.000	1	34.116.116	5	5	8.175.000	18.750.000	500	600
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penyjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Janggan dan Jejangnya															
2	1	03	2.03	03	Pengadaan, Ketersediaan, Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (NBCP)	350	300.000.000	200	2.082.234.974	373	50.566.000	243.234.000	273	342.600.000	600
	4				Jumlah Orang yang Mengikuti Ketersediaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (NBCP)										
2	1	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penjangkauan Pelayanan KB	19	210.000.000	3	1.442.970.920	348	0	138.706.000	348	138.706.000	600
	4				Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Aliran dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket)										
2	1	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringnya	4	15.000.000	1	7.370.000	0	0		0	0	600
	4				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringnya										
2	1	03	2.03	04	Pembudayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB	31	400.250.000	500	1.245.508.600	0		179.793.600	0	179.793.600	600
	4				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB										

2	1	4	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	31	211.250.000						5	29.293.600					0	29.293.600	0,0	0,0
						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang diberikan (Desa)	106	129.000.000						8	849.380.000		35.000.000			0	35.000.000	0,0	0,0
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	35	60.000.000						35	386.925.000		115.500.000			0	115.500.000	0,0	0,0
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase remaja perempuan umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	720.000.000						0,001	1.998.000.000		552.800.000			0	552.800.000	0,0	0,0
							Persentase Balita yang mengikuti KOBAR PAUD (%)	95							80						0			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan kegiatan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program. Pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Gambaran kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prangkat Daerah DP2KBP3A Tahun 2023 Triwulan II

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (2023)					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1			
	3	4	5											
A	Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD													
1	Angka Kelahiran Total (TFR)			3,1	3	3	2,8	2,9	0	3	2,8			
2	Indeks Pembangunan Gender			0	92,24	93,16	94,08	0	0	93,16	94,08			
3	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)				20	19	18	25	63	19	18			
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)				25	23	21	3	4	23	21			
B	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												

[illegible]

6	Rasio KDRT				0	0	0	0	0,001	0	0	0
7	Partisipasi angkatan kerja Perempuan				47,5	48,2	48,4	48,2	62,8	0	48,2	48,4

Dari Tabel yang ada menunjukkan bahwa hampir semua program belum mencapai hasil optimal ini dikarenakan belum optimalnya kinerja penyuluh lapangan di masing-masing kecamatan, dengan demikian maka pada sisa waktu tahun 2023 di upayakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Renja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 memuat 9 Program, 25 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 13.222.590.138, sebelum perubahan sebesar Rp. 11.266.860.800, adapun perubahan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Membiayai 1 Program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.887.860.800, setelah perubahan sebesar Rp. 2.901.499.334, pada urusan ini mengalami pengurangan akibat terjadinya refocusing dan juga ada penambahan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Program Pengendalian Penduduk

Membiayai 3 Program, 6 Kegiatan dan 20 Sub kegiatan dengan total anggaran, sebelum perubahan sebesar Rp. 6.851.000.000, setelah perubahan sebesar Rp. 10.076.169.254 mengalami kenaikan karena adanya penambahan sub kegiatan baru. Pada urusan ini terdapat 2 sub kegiatan yang pendanaannya melalui DAU Spesifik Grand yaitu pada program Pembinaan Keluarga Berencana sebesar Rp. 566.400.000, dan juga terdapat pembiayaan kegiatan dari dana DAK Fisik dan Non Fisik.

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak terdiri dari:

- Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak

Membiayai 5 Program, 8 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 530.000.000, dan setelah perubahan sebesar Rp. 244.921.550 mengalami penurunan karena adanya refocusing namun terdapat juga 3 sub kegiatan yang pendanaan dari DAU Spesifik Grand, dimana 1 sub kegiatan merupakan sub kegiatan penambahan sebesar Rp. 49.995.510, sehingga total DAU Spesifik Grand pada urusan ini sebesar Rp. 64.940.306. Adapun rincian program/ kegiatan dan

pendanaan perubahan renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Lampiran 3.1

Tabel. 3.1

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2023 DP2KBP3A

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.-)			LOKASI		
						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)									TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2-08	2-14	0-0	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100											
					Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	75											
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	50											
					Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100											
					Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	8											
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2		Larantuka									
x	xx	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2		Larantuka									
x	xx	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4		Larantuka									
x	xx	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		Larantuka									
x	xx	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	3		Larantuka									
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	28		Larantuka									
x	xx	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28		Larantuka									

URUSAN		BIDANG		URUSAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)		TARGET KINERJA DAN KEBANGWA PENGELOMPOKAN TAHUN 2022					SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERKAS I (BERKAS II) ANGKARAN (Rp.-)		SUMBER DANA		P N P D								
																		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.-)		LOKASI		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp.-)		LOKASI									
																		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 8 - 5)		(11)		(12)		(13)	
x	xx	01	2.02	03								(2)		(3)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	54.000.000	Larantuka	1	47.400.000	Larantuka	1	47.400.000	Larantuka	1	47.400.000	Larantuka	(10 = 8 - 5)	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.02	07											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000	Larantuka	2	14.999.660	Larantuka	2	14.999.660	Larantuka	(340)	APBD II (DAU)										
x	xx	01	2.03												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	15.000.000		1	7.499.620		1	7.499.620		1	7.499.620		(7.500.380)						KP		
x	xx	01	2.03	06											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	15.000.000	Larantuka	1	7.499.620	Larantuka	1	7.499.620	Larantuka	1	7.499.620	Larantuka	(7.500.380)	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.05												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10.000.000		1	9.995.000		1	9.995.000		1	9.995.000		(5.000)					KP			
x	xx	01	2.05	04											Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000	Larantuka	1	9.995.000	Larantuka	1	9.995.000	Larantuka	1	9.995.000	Larantuka	4.995.000	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.05	09											Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	5.000.000	Dalam dan Luar Daerah		-			-			(5.000.000)										
x	xx	01	2.06												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	149.000.800		100	204.553.320		100	204.553.320		100	204.553.320		55.552.520					KP			
x	xx	01	2.06	01											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	2	2.000.000	Larantuka	2	1.973.660	Larantuka	2	1.973.660	Larantuka	2	1.973.660	Larantuka	(26.340)	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	02											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	3	25.000.000	Larantuka	3	24.997.700	Larantuka	3	24.997.700	Larantuka	3	24.997.700	Larantuka	(2.300)	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	03											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	1	5.000.000	Larantuka	1	7.498.500	Larantuka	1	7.498.500	Larantuka	1	7.498.500	Larantuka	2.498.500	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	04											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	12	60.000.000	Larantuka	12	54.998.800	Larantuka	12	54.998.800	Larantuka	12	54.998.800	Larantuka	(5.001.200)	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	05											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	20.000.800	Larantuka	1	24.999.660	Larantuka	1	24.999.660	Larantuka	1	24.999.660	Larantuka	4.998.860	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	08											Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000	Larantuka	12	15.000.000	Larantuka	12	15.000.000	Larantuka	12	15.000.000	Larantuka	3.000.000	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.06	09											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000	Dalam dan Luar Daerah	12	75.085.000	Larantuka	12	75.085.000	Larantuka	12	75.085.000	Larantuka	50.085.000	APBD II (DAU)							
x	xx	01	2.07												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)	11	138.000.000		11	25.017.500		11	25.017.500		11	25.017.500		(112.982.500)					KP			

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	P N	P D			P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	10	50.000.000	Larantuka									(10 - 8 - 5) (50.000.000)				
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	80.000.000	Larantuka									(80.000.000)				
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90	930.000.000		90	197.489.800							(732.510.200)			KP	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2.200.000	Larantuka	12	1.499.800	Larantuka						(700.200)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	25.000.000	Larantuka	12	35.990.000	Larantuka						10.990.000	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (laporan)	1	10.000.000	Larantuka									(10.000.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 (93 orang)	892.800.000	Larantuka	12	160.000.000	Larantuka						(732.800.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90	201.200.000		95	120.961.500							(80.238.500)			KP	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	32	130.000.000	Larantuka	32	70.600.000	Larantuka						(59.400.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	4.200.000	Larantuka									(4.200.000)				
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	42.000.000	Larantuka	1	38.911.500	Larantuka						(3.088.500)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)	9	15.000.000	Larantuka	9	4.950.000	Larantuka						(10.050.000)	APBD II (DAU)			
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)	2	10.000.000	Larantuka	2	6.500.000	Larantuka						(3.500.000)	APBD II (DAU)			

7	08				Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		630.000.000		244.924.555		Q35-316-A90N	
8	08	02			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	46	145.000.000	46	43.988.100	(95.013.900)	PM-3 PU-2

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023										PRIORITAS							
KODE				URUSAN / BIDANG PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	P N P D			
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)			LOKASI	P N	P D	
2	08	02	2.01		(1)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)	(13)
					(2)	Pembinaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		6	50.000.000		5	19.986.470		(30.013.530)		KP-3	KU-2
2	08	02	2.01	04		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		5	50.000.000	Berpusat di Lantutuka (Prioritas Desa Lewawang, Rangbaring, Tenawahang, Menanga, Oyang Baring, Blepanawa, Pukan Tobo Wangi Bao, Nimun Danobao, Lile, Oesayang, Amagarapat, Tanah Lem, Ekasapta)	5	19.986.470	Berpusat Lantutuka (Prioritas Desa Lewawang, Rangbaring, Tenawahang, Menanga, Oyang Baring, Blepanawa, Pukan Tobo Wangi Bao, Nimun Danobao, Lile, Oesayang, Amagarapat, Tanah Lem, Ekasapta)	(30.013.530)	APBD II (DAU)		
2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota		1	70.000.000			29.999.630		(40.000.370)		KP-3	KU-2
2	08	02	2.02	01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		1	30.000.000	Lantutuka				(30.000.000)			
2	08	02	2.02	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		10	40.000.000	19 Kecamatan (Desa Prioritas Lewopao, Daniwato, Konga, Bubuagamu, Nawuta Lewungu, Tenawahang, Dawataa, Menanga, Wabobuku, Pohon Sint, Suleng Waseng, Bulela, Mokantarak, Weranggere, Ekasapta)	10	29.999.630	19 Kecamatan (Desa Prioritas Lewopao, Daniwato, Konga, Bubuagamu, Nawuta Lewungu, Tenawahang, Dawataa, Menanga, Wabobuku, Pohon Sint, Suleng Waseng, Bulela, Mokantarak, Weranggere, Ekasapta)	(10.000.370)	APBD II (DAU)		
2	08	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		20	25.000.000	Lantutuka	24			(25.000.000)		KP-3	KU-2

21	09	04	2 02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (orang)	10	39 000 000	Larantuka	08 000 000
21	08	04	2 02	03	Pengutan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	30 000 000	Larantuka	05 000 000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (SEKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	P / N	P / D	PRIORITY
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI						
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(3) Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)	1	27.000.000		(6) Larantuka	(8) 19.999.350	(9) 19.999.350	(10) = 8 - 9 (7.000.650)					
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Keseluruhan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	1	27.000.000	Larantuka	1	19.999.350	Larantuka	19.999.350	(7.000.650)	APSD II (DAL)			
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Dan Gender	Persentase dasar/ kelurahan menyediakan data gender (%)	25	50.000.000				24.999.675		(25.000.325)				
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	50.000.000				24.999.675		(25.000.325)				
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1	50.000.000	Larantuka	1	24.999.675	Larantuka	24.999.675	(25.000.325)	APSD II (DAL)			
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	120.000.000			0,02	19.999.900		(100.000.100)				PNJ PUS
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8	40.000.000			8	-		(40.000.000)				
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1	40.000.000	Berpusat Larantuka (Desa Phontas Brawan, Pohon Sini, Lepao, Mananga, Mokantarak, Weranggere, Lewokluok)			-		(40.000.000)				

2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35	40.000.000	Larantuka	35	19.999.900	Larantuka	APBD II (DAU)
2	08	06	2.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35	35.000.000	Larantuka	35	19.999.900	Larantuka	APBD II (DAU)
2	08	06	2.02	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	45.000.000	Larantuka				(45.000.000)

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023						SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	PRIORITAS		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			LOKASI			PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.-)			LOKASI	P N	P D
						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI								
2	14	(1)	(2)	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	14	02		Program Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	7	185.000.000		7	383.926.760			10.076.169.254	3.225.169.254			PP		
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sarasehan dan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Laporan)	1	185.000.000			-				(185.000.000)					
2	14	02	2.01	Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab.Kota (dokumen)	1 Dok	75.000.000	Larantuka	-					(75.000.000)					
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan (Dokumen)	6	55.000.000			383.926.760				325.926.760		KP			
2	14	02	2.02	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	1	35.000.000	Larantuka	1	19.999.900	Larantuka			(15.000.100)	APBD II (DAU)				
2	14	02	2.02	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan (dokumen)	5	20.000.000	Larantuka		-				(20.000.000)					
2	14	02	2.02	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga (laporan)		-		3	101.066.860	Larantuka			101.066.860	APBD II (DAK)				
2	14	02	2.02	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (laporan)		-		12	185.400.000	Larantuka			185.400.000	APBD II (DAK)				

No	Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023				Bertambah / (Berkurang) Anggaran (Rp.-)	Sumber Dana	Prioritas		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
2	14	03	2.01	01	01	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	53,63	0.565.000.000	Larantuka	53,63	7.794.242.494	Larantuka	53,63	1.229.242.494	PA-2 PA-2
								62	40.000.000		62	1.593.362.000		62	1.553.362.000	
2	14	03	2.01	01	01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	-	Larantuka	15	201.000.000	Larantuka	15	201.000.000	APSD II (DAK)
								1	-		15	201.000.000		15	201.000.000	

KODE					TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023										PRIORITAS			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.-)	SUMBER DANA	P N	P D
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)				
2	14	03	2.01	02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1	15.000.000	Larantuka									
2	14	03	2.01	04		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	15.000.000	Larantuka	1	150.000.000	Larantuka		155.000.000	APSD II (DAK)			
2	14	03	2.01	06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	10.000.000	19 Kecamatan	4	243.200.000	19 Kecamatan		253.200.000	APSD II (DAK)			
2	14	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai di Balai Penyuluhan KBPK					12	914.938.000	19 Kecamatan		914.938.000	APSD II (DAK)		
2	14	03	2.01	08		Pengendalian Program KBPK					2	84.200.000	Larantuka		84.200.000	APSD II (DAK)		

BAB IV

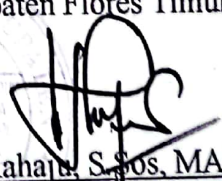
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2023. Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Flores Timur


Sri Ardi Rahaja, S.Sos, MAP
NIP. 19691016 199903 2 007